

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang keluarnya Gambia dari Mahkamah Pidana Internasional pada era Yahya Jammeh. Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan internasional permanen yang dibentuk dengan tujuan untuk menginvestigasi, mengadili individu, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yakni: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Sampai saat ini, hampir seluruh negara investigasi dari Mahkamah Pidana Internasional merupakan negara Afrika. Gambia menuntut Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili Uni Eropa atas kematian migran Afrika di Pantai Eropa dan menuntut mantan PM Inggris Tony Blair atas keterlibatannya dalam Perang Irak. Selain itu, standar ganda yang diberlakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap Dewan Keamanan PBB memunculkan kritik dari negara Afrika khususnya Gambia. Kasus Sudan (Darfur) dan Libya dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB sedangkan 3 dari 5 anggota pemegang hak veto bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional. Di sisi lain, Pemerintahan Yahya Jammeh mendapat kecaman dari dunia internasional dan juga nasional Gambia karena kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat terutama terhadap pihak oposisi, aktivis, jurnalis dan kaum LGBT. Uni Eropa, PBB, *Amnesty Internasional* dan *Human Right Watch*, menuntut Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan investigasi terhadap Pemerintahan Yahya Jammeh

Skripsi ini bertujuan untuk membahas apa saja faktor yang melatarbelakangi kebijakan Gambia keluar dari Mahkamah Pidana Internasional. Terlebih akan menjelaskan apa bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional serta kebijakan Yahya Jammeh yang menjadi kontroversi dan dikecam rakyat Gambia dan dunia internasional.

Kata kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Gambia, Dewan Keamanan PBB.

WITHDRAWAL OF THE GAMBIA FROM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE ERA OF YAHYA JAMMEH

ABSTRACT

This thesis discusses the foreign policy of The Gambia to leave the International Criminal Court in Yahya Jammeh's government. The International Criminal Court is a permanent international court established to investigate, prosecute and try individuals accused of committing the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. To date, almost all of its full-fledged investigations have focused on Africa. The Gambia demanded the International Criminal Court to prosecute the European Union for the death of African migrants on the European Coast and sued former British Prime Minister Tony Blair for his suspicion in the Iraq War. In addition, the double standards imposed by the International Criminal Court against the UN Security Council led to criticism from African countries, especially the Gambia. The case of Sudan (Darfur) and Libya are referred to by the UN Security Council while 3 of the 5 veto holders are not members of the International Criminal Court. On the other hand, the Yahya Jammeh Government has come under fire from the international and national Gambia for the violence committed against the people, especially against the opposition members, human right defenders, journalists and the LGBT communities. The European Union, the United Nations, Amnesty International and Human Rights Watch, demand the International Criminal Court to investigate Yahya Jammeh's Government.

This thesis aims to discuss what factors behind the Gambian policy to leave the International Criminal Court. Moreover, it will explain what forms of discrimination carried out by the International Criminal Court as well as Yahya Jammeh's policies that have become controversial and criticized by the Gambia people and the international community.

Keywords: International Criminal Court, The Gambia, UN Security Council.